

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA JETIS KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna,
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Pada Prodi Akuntansi



OLEH :

BUNGA BERLIAN NOERMA PUTRI

NPM : 2112020113

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS (FEB)
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan-Nya tugas penyusunan Skripsi ini dapat diselesaikan. Penyusunan Skripsi ini merupakan bagian dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang berjasa membantu dalam mengerjakan penyusunan skripsi ini . Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis dengan ketulusan hati mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr.Zainal Afandi, M.Pd. selaku Rektor Universitas Nusantara PGRI Kediri.
2. Dr. Amin Tohari, M.Si . selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri
3. Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.AK., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.
4. Erna Pustipa, SE., M.Ak. selaku dosen pembimbing 1 yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan.
5. Drs.Ec Sugeng, M.M., M.Ak., Ak., CA., Asean., CPA,ACPA,CBV,BKP,CPMA,CertDA,CRA,CRP. Selaku dosen pembimbing 2 yang telah memberikan waktu bimbingan dan arahan.
6. Kedua orangtua saya dan adik-adik saya tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang serta motivasinya
7. Teman satu-satunya saya yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan semangat untuk saya.
8. Teman-teman Akuntansi angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan dan semangat.
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis buka lebar agar nantinya dapat dihasilkan skripsi yang baik dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Kediri, 21 januari 2026

Bunga Berlian Noerma Putri

NPM : 2112020113

Skripsi oleh :

BUNGA BERLIAN NOERMA PUTRI

NPM : 2112020113

Judul :

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA JETIS KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK**

Telah Disetujui Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian/ Sidang Skripsi Prodi
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

ERNA PUSPITA S.E.,M.Ak

NIDN.0711128803

**Drs. Ec. Sugeng, M.M., M.Ak., Ak.,
CA., Asean.,CPA,ACPA,CBV,BKP,**

CPMA,CertDA,CRA,CRP.

NIDN.0713026102

Skripsi oleh :

BUNGA BERLIAN NOERMA PUTRI

NPM. 2112020113

Judul :

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
DI DESA JETIS KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian/Sidang Skripsi Prodi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri

Pada tanggal :

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji:

1. Ketua : Erna Puspita, S.E.,M.Ak _____
2. Penguji I : Dr. Faisol, S.Pd., M.M _____
3. Penguji II : Drs.Ec Sugeng, M.M., M.Ak., Ak., CA., Asean., CPA.,
ACPA., CBV., BKP., CPMA., CertDa,CRA,CRP_____

Mengetahui,

Dekan FEB

Dr. Amin Tohari, M.Si.
NIDN. 0715078102

LEMBAR MOTO

Motto :

" kesuksesan datang bagi mereka yang fokus pada tujuan, bukan pada penghalang "

Kupersembahkan karya ini buat :

- Allah SWT Yang Maha Kuasa atas Segalanya
- Ayah, Ibu, Adik, dan keluarga tersayang
- Teman-teman Akuntansi yang selalu solid dan kompak
- Bapak dan Ibu Pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
- Teman-Teman yang selalu support saya yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-satu.
- Seluruh jajaran staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta Dosen Program studi Akuntansi
- Almamater tercinta Universitas Nusantara PGRI Kediri

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama : Bunga Berlian Noerma Putri
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tgl. lahir : Nganjuk, 23 Maret 2002
NPM : 2112020113
Fak/Jur./Prodi. : FEB/ S1 Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, Januari 2026
Yang Menyatakan dibawah ini

Bunga Berlian Noerma Putri

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA / LANDASAN TEORI	
A. Landasan teori	
1. Teori <i>good governance</i>	6
a. Definisi dana desa	6
b. Penyaluran dana desa	7
c. Prioritas alokasi dana desa	8
d. Pengelolaan dana desa	9
e. Indikator pengelolaan alokasi dana desa	10
2. Transparansi	11
a. Pengertian transparansi	11
b. Karakteristik transparansi	14
c. Indikator transparansi	16
d. Manfaat transparansi	16
e. Bentuk pelaksanaan transparansi publik	17

3. Akuntabilitas	19
a. Pengertian akuntabilitas dari beberapa sumber buku	19
b. Prinsip-prinsip akuntabilitas	21
c. Macam – macam akuntabilitas	21
d. Indikator akuntabilitas	23
4. Partisipasi masyarakat	24
a. Definisi partisipasi masyarakat	24
b. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat	25
c. Indikator partisipasi masyarakat	25
B. Kerangka berfikir	26
1. Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa	26
2. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa	26
3. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa	27
C. Hipotesis penelitian	28
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	30
B. Definisi Operasional Variabel	30
C. Instrumen Penelitian	32
1. Instrumen Penelitian	32
2. Uji validitas dan reliabilitas instrumen	35
D. Populasi dan Sampel	41
1. Populasi	41
2. Sampel	41
E. Prosedur penelitian	41
F. Tempat Dan Waktu Penelitian	46
1. Tempat penelitian	46
2. Waktu penelitian	46
G. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	47
H. Teknik Analisis Data	48

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	52
1. Deskripsi data hasil penelitian	52
a. Deskripsi data variabel independen	52
b. Deskripsi data variabel dependen	54
2. Analisis data	55
a. Uji Asumsi Klasik	63
1) Uji Normalitas	63
a) Analisa grafik	63
b) Analisis statistik	63
c) Uji multikolinieritas	65
d) Uji heteroskedastisitas	66
b. Analisis regresi linier berganda	67
c. Hasil uji hipotesis	68
1) Hasil uji parsial	69
2) Uji F (uji simultan)	69
d. Koefisien determinasi	70
B. Pembahasan	72
1. Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa..	
.....	72
2. Pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa	
.....	73
3. Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana	
desa	74
4. Pengaruh simultan X1, X2, dan X3 terhadap pengelolaan alokasi	
dana desa	75

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	76
B. Implikasi.....	76
C. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 : Pengukuran variabel / indikator variabel	32
3.2 : Alternatif Jawaban responden	32
3.3 : Hasil uji validitas variabel X1	36
3.4 : Hasil uji validitas variabel X2.....	37
3.5 : Hasil uji Validitas variabel X3	38
3.6 : Hasil uji validitas variabel Y	39
3.7 : Hasil uji reliabilitas	41
3.8 : Jadwal penelitian	46
4.1 : distribusi responden berdasarkan jabatan	53
4.2 : frekuensi variabel transparansi	55
4.3 : frekuensi variabel akuntabilitas	57
4.4 : frekuensi variabel partisipasi masyarakat	59
4.5 : frekuensi variabel pengelolaan alokasi dana desa	61
4.6 : hasil uji normalitas menggunakan kolmogrov smirnov	66
4.7 : hasil uji multikolinieritas	67
4.8 : hasil analisis regresi linier berganda	68
4.9 : hasil uji parsial	70
4.10 : hasil uji F	71
4.11 : hasil uji koefisien determinasi	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 : Kerangka Konseptual	28
3.1 : Prosedur Penelitian	45
4.1 : Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram	64
4.2 : Hasil Uji Normal Probability Plot	65
4.3 : Hasil Uji Heteroskedastisitas	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. : Kisi-kisi instrumen penelitian	71
2. : Kuesioner penelitian	74
3. : Berita acara kartu binbingan	80
4. : Hasil data Tabulasi	82
5. : Surat ijin penelitian	88

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan tingkat pemerintahan paling bawah di Indonesia, namun keberadaannya paling penting sebagai dasar pelaksana pelayanan publik dan penyedia pemenuhan hak - hak publik yang berkaitan langsung dengan rakyat. Selain itu, pemerintah Indonesia memiliki regulasi baru yakni pembangunan pemerintahan dari tingkat bawah atau daerah pinggiran . Sehingga, disahkan- lah undang-undang yang mengatur tentang desa yaitu undang -undang nomor 6 tahun 2014. Adanya UU desa ini diharapkan menjadi tonggak sinergi baru pemerintah desa untuk memajukan desanya dan ikut andil dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik.

Dalam melaksanakan wewenangnyanya dan untuk mencapai swakelola pembangunan desa yang baik, sesuai dengan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi maka desa berhak untuk memiliki sumber-sumber pendapatan dan berhak mengatur keuangannya sendiri yang berasal dari dana desa. Dana desa (DD) merupakan salah satu bagian dari pendapatan desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui transfer kepada tiap kabupaten /kota serta digunakan untuk menjalankan dan mengelola pendanaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (UU Nomor 6 tahun 2014).

Pembangunan desa merupakan suatu program yang selalu menjadi prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Undang - undang No. 06 tahun 2014 tentang Desa pasal 78 dengan jelas menerangkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Desa dalam upaya

pembangunan tentu tidak terlepas dari unsur-unsur maupun lapisan masyarakat yang mendiaminya. Baik itu dari pemerintah dan juga masyarakat di dalam desa.

Pemerintah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola keuangannya sendiri melalui pemberian alokasi dana desa (ADD) yang dilakukan oleh pemerintah daerah. ADD merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten / kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus (UU No. 6 tahun 2014 pasal 71 ayat 4). Tujuan dari ADD itu sendiri adalah untuk membiayai kegiatan operasional desa dan program pembangunan desa.

Banyaknya kasus penyimpangan penggunaan dana desa menuntut pemerintah untuk melakukan pembenahan, seperti pembenahan aparat desa dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen publik yang baik. Hal ini sesuai dengan permendagri No. 113 (2014) tentang pengelolaan keuangan desa, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus didasarkan pada asas-asas transparan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. Selain itu, diperlukan aparat desa yang andal dan berkompeten, baik secara teknis maupun administratif dalam pengelolaan dana desa.

Desa jetis merupakan salah satu desa yang di kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk yang terdiri dari 2 dusun dengan karakteristik wilayah pertanian yang kuat. Mayoritas penduduk di Desa Jetis ini berprofesi sebagai petani, baik di sektor pertanian padi, hortikultura, maupun perkebunan rakyat. Dalam rangka mengoptimalkan potensi wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memperkuat pembangunan di berbagai sektor.

Pada desa Jetis ini dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk transparansinya masih belum dijalankan dengan baik, dimana kurangnya informasi mengenai jumlah pengeluaran maupun pemasukan dalam menjalankan kegiatan Alokasi Dana Desa. Selain itu dalam akuntabilitas permasalahan yang ada, dimana masih rendahnya kapasitas aparatur desa dalam penguasaan teknologi, manajemen dan pelayanan kepada masyarakat. Dan untuk partisipasi dimana kurangnya keterbukaan informasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa serta lemahnya pengendalian internal yang menyebabkan resiko penyimpangan. Masalah lainnya yang dihadapi seperti yang disampaikan oleh salah satu aparatur desa yaitu keterlambatan pelaporan penggunaan alokasi dana desa yang berdampak pada pencairan dana tahap berikutnya

Transparansi merupakan bagian dasar untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang terbuka, memberikan kemudahan akses informasi, dan adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap kegiatan pemerintahan. Di mana aparat desa memberikan akses yang luas untuk masyarakat dalam memperoleh informasi penyelenggaraan desa, terutama pengelolaan dana desa. Hal ini diwujudkan untuk menghindari adanya keraguan kepada aparat desa. Aparat desa akan selalu memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat, sehingga dapat menjadi pengawasan untuk menghindari penyimpangan pengelolaan dana desa dan terjalinnya hubungan yang kuat antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan begitu dapat dirumuskan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil dari variabel transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan alokasi dana desa. Namun terdapat pula dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa hasil dari variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Angelia et al., 2020).

Adanya asas akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa merupakan hal yang penting. Pengelolaan alokasi dana desa yang bagus adalah pengelolaan yang bisa dipertanggungjawabkan dari perancangan, penerapan, hingga pelaporan. Teori keagenan tentunya berkaitan dengan variabel akuntabilitas karena akuntabilitas merupakan tanggungjawab perangkat desa sebagai agent atas kinerja perangkat pemerintah desa dimulai dari perencanaan hingga pengawasan kegiatan kepada masyarakat desa sebagai principal. Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang efektif didukung dengan adanya kualitas yang baik dari akuntabilitas dalam suatu pemerintah desa. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Namun, terdapat penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Yanto & Aqfir, 2021).

Partisipasi masyarakat merupakan tonggak dasar atas kesuksesan pemerintah dalam pengelolaan dana desa sebagai aspek pengawasan dan aspirasi dari masyarakat, partisipasi masyarakat merupakan tujuan utama adanya penyeleggaran pemerintahan. Maka dari itu, untuk mewujudkan prioritas tujuan utama pemerintah secara optimal dibutuhkan partisipasi masyarakat yang dapat memberikan masukan, penilaian dan pengawasan pada kinerja aparat desa. Dalam pengelolaan dana desa tentunya partisipasi masyarakat berperan aktif untuk meningkatkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan ekonomis, karena aspirasi masyarakat dapat menjadi bentuk tujuan penggunaan dana tersebut. Selain itu, masyarakat berhak untuk mengevaluasi, menilai, dan mengawasi pengelolaan dana agar terciptanya pengelolaan dana yang tertib. Sehingga, apabila suatu desa menerapkan asas partisipasi masyarakat yang baik, maka pengelolaan dana desa juga dapat dikatakan optimal. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa (Angelia et al., 2020).

Namun, terdapat pula dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa (Yanto & Aqfir, 2020).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk membahasnya dalam judul **“Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap alokasi dana desa” studi kasus pada Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah dalam hal ini yaitu :

- a) Apakah tingkat transparansi pemerintah desa berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan alokasi dana desa di desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ?
- b) Apakah akuntabilitas berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ?
- c) Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan alokasi Dana Desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ?
- d) Apakah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu langkah untuk menemukan sebuah jawaban atas pertanyaan melalui penelusuran ilmiah terhadap prosedur. Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

- a) Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

- b) Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.
- c) Untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.
- d) Untuk menganalisis pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat secara simultan terhadap pengelolaan alokasi dana desa di Desa Jetis Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, maka dari itu penulis berharap penelitian dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tentang transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi ataupun saran bagi pemerintah desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pemerintah desa tentang pentingnya mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, A., & Ahmad, H. (2020). *Manajemen Keuangan Desa: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Angelia, S., Sari, D., & Putri, F. (2020). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 8(2), 134–145.
- Ardiansyah, A., Rahmawati, R., & Fauzi, M. (2022). Pengaruh alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 15(1), 55–64.
- Badrudin, R., & Siregar, H. (2021). Efektivitas pelaksanaan APBDes dalam pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 12–23.
- Diansari, S., & Eka, Y. (2015). Implementasi aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 9(2), 56–67.
- Field, A. (2018). **Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics** (5th ed.). SAGE Publications Ltd.
- Labangu, Y. L., Hasanuddin, A., & Ramli, M. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada desa Labulu-Bulu Kecamatan Parigi Kabupaten Muna. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 10 (1), 23–35.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2014). *Akuntansi sektor publik* (Ed. revisi). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2017). *Akuntabilitas dan transparansi keuangan publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Medina, M. (2012). Keuangan publik dan transparansi fiskal. *Jurnal Administrasi Publik*, 5 (3), 67–80.
- Muh. Fachrun, I., et al. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 4 (1), 19–27.

- Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ratminto, H., & Winarsih, S. (2005). *Manajemen pelayanan publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- R. Rudy Karyanto. (2016). Evaluasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2015 dan 2016. *Jurnal Anggaran Negara*, 4(1), 55–67.
- Sjamsiar. (2016). *Akuntabilitas dan tata kelola pemerintah desa*. Bandung: Fokus Media.
- Sofiyah Yatimah, T., et al. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(2), 101–110.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi desa: Panduan tata kelola keuangan desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sulistyo. (2019). Indikator transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan*, 7 (1), 77–89.
- Tanjung, H. (2011). *Etika pemerintahan dan transparansi publik*. Jakarta: Kencana.
- Ultafiah, W. (2017). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5 (3), 89–101.
- Tanjung, H. (2011). *Transparansi Keuangan dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yanto, E., & Aqfir, M. (2021). Pengaruh transparansi dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa. *Jurnal Akuntansi Desa*, 6 (2), 88–97.
- Yuli Lestari Labangu, Y., Sari, N., & Wahyuni, H. (2022). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 12 (1), 45–59.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.

